
PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN TIPE INDUSTRI TERHADAP PENGUNGKAPAN KINERJA SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA

Septiana Rahayu¹, Eko Suyono², Christina Tri Setyorini^{3*}, Mafudi⁴

¹Universitas Jenderal Soedirman; septiana.rahayu@mhs.unsoed.ac.id

²Universitas Jenderal Soedirman; ekyo75@unsoed.ac.id

³Universitas Jenderal Soedirman; christina.setyorini@unsoed.ac.id; *corresponding author*

⁴Universitas Jenderal Soedirman; mafudi1975@yahoo.com

Abstract

This study aimed to analyze the effect of corporate governance and type of industry on the corporate social responsibility disclosure. Corporate governance mechanism is used the proportion of independent commissioners, audit committee, institutional ownership and managerial ownership. The population in this study are companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) in the year 2012-2014. The number of samples in this study amounted to 132 firm year by purposive sampling method. Based on the results of research and data analysis using multiple linear regression showed that: 1) the proportion of independent commissioners positive influence on the CSR disclosure, 2) the audit committee positive influence on the CSR disclosure, 3) institutional ownership positive influence on the CSR disclosure, 4) managerial ownership had no influence on the CSR disclosure, and 5) industrial type variables that influence on the CSR disclosure is agriculture, consumer goods industry, and property and real estate. While the mining sector, basic industry and chemicals, miscellaneous industry, and transportation and infrastructure had no influence to the CSR disclosure.

Keywords: *corporate governance, proportion of independent commissioners, audit committee, institutional ownership, managerial ownership, type of industry, corporate social responsibility disclosure.*

PENDAHULUAN

Perusahaan memiliki peranan yang sangat penting di dalam perekonomian suatu negara. Peranan tersebut sangat penting mengingat adanya sumber daya yang terbatas, sehingga sumber daya tersebut harus dialokasikan seoptimal mungkin untuk masyarakat (Suyono, 2010). Sebagai bagian dari masyarakat, keberadaan perusahaan tidak bisa terlepas dari masyarakat dan lingkungan. Keberadaan dan dampak aktivitas perusahaan seringkali bertentangan dan merugikan pihak lain. Dan terbukti bahwa beberapa aktivitas perusahaan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam serangkaian masalah lingkungan dan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Kasus lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo yang terjadi sejak tahun 2006, masalah pertambangan PT. Freeport Indonesia di Papua yang mengeksploitasi kekayaan bumi (tembaga, emas dan uranium) menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah yang sangat mengancam kehidupan masyarakat disana, dan yang terjadi baru-baru ini adalah bencana kabut asap akibat kebakaran hutan di daerah Sumatera dan Kalimantan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Penerapan CSR oleh perusahaan dapat diwujudkan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRSD) yang dilaporkan dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan (Sari, 2012). Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *corporate governance*, yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders*-nya demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama, 2007).

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) harus mencerminkan pada sifat keterbukaan informasi (*transparency*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). Tanggung jawab sosial berorientasi kepada para *stakeholders*, hal ini sejalan dengan salah satu prinsip GCG yaitu *responsibility* (Murwaningsari, 2009). Terdapat dua model struktur kepemilikan yang berkembang di dunia yaitu struktur kepemilikan yang terpusat dan struktur kepemilikan yang menyebar. Ketika struktur kepemilikan saham sebuah perusahaan terpusat, maka fungsi kontrol dikendalikan oleh sedikit pihak sehingga lebih efisien, namun praktiknya akan menduduki pihak manajerial dikarenakan adanya pihak yang terlalu dominan sering kali mengambil keputusan secara sepihak. Sedangkan ketika struktur kepemilikan saham perusahaan menyebar maka fungsi kontrol dijalankan oleh banyak pihak sehingga diperlukan biaya yang lebih besar untuk menjalankan fungsi pengendalian. Semakin menyebarnya pemusatan kepemilikan saham, maka manajemen tidak lagi dapat secara bebas untuk membuat kebijakan sendiri karena manajemen akan dihalangi oleh pemegang saham eksternal dalam membuat perencanaan strategi perusahaan jika dilakukan tanpa transparansi. Konsep ini merupakan kerangka dalam *corporate governance* dalam cakupan hubungan harmonis antara manajer, pemegang saham besar, dan pemegang saham minoritas (Suyono, 2010:109).

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak dilakukan untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan, namun belum menunjukkan hasil yang konsisten. Hasil penelitian Permata Sari (2014) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, berbeda dengan hasil Nurkhin (2009), Das, Dixon dan Michael (2015) terbukti komposisi dewan komisaris independen terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Dalam penelitian Hani (2012) dan Suryono dan Prastiwi (2011) menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan Terzaghi (2012), Nasir, Ilham dan Utara (2014), Adhipradana dan Daljono (2014) dan Waryanto (2010) menunjukkan komite audit yang diproksikan dengan jumlah rapat komite audit tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan Susanti dan Riharjo (2013), Adnantara (2013), Saraswati dan Yudhistira (2015) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, sedangkan penelitian Barnae dan Rubin (2005), Nurkhin (2009), dan Rawi dan Muchlish (2010) yang menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian Rosmasita (2007), Muchlish dan Rawi (2010) dan Saraswati dan Yudhistira (2015) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. Perbedaan ditunjukkan oleh penelitian Widyasari dan Rahman (2008), Said et al (2009), Susanti dan Riharjo (2013), Adnantara (2013) dan Janra (2015) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Selain *corporate governance* yang berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan juga dipengaruhi oleh tipe industri. Penelitian yang dilakukan oleh Suropto (2000) menggunakan variabel tipe industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan bank dan non bank, hasilnya tidak signifikan. Subiyantoro dalam Rahayu (2006) menggunakan variabel tipe industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan manufaktur dan non manufaktur, tetapi hasilnya tidak signifikan. Dalam penelitian Rahayu (2006) memasukkan variabel industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan jasa dan non jasa (riil), hasilnya tidak signifikan. Sedangkan dalam penelitian Sembiring (2005), Darlis dkk (2014), Zulfi (2014), Widyasari dan Rahman (2008), dan Anggraini (2006) yang menggunakan variabel tipe industri yang dikelompokkan dalam *high profile* dan *low profile* menunjukkan variabel tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dalam penelitian ini tipe industri dikelompokkan berdasarkan sektor usaha yang dijalankannya yang dikelompokkan menjadi 7 sektor industri yaitu sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar dan Kimia, Aneka Industri, Industri Barang Konsumsi, Properti dan Real Estate, dan Transportasi dan Infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan?
4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan?
5. Apakah Tipe Industri berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan?

TELAAH PUSTAKA

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

CSR merupakan komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya untuk senantiasa memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sosial dan lingkungan (Sari, 2012). Menurut *The World Business Council on Sustainable Development* (WBCSD) menyatakan CSR adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika berperilaku (*behavioural ethics*) dan berkontribusi terhadap pembagunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*).

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*)

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan (Suwardjono, 2005).

Teori yang Mendasari Pengungkapan CSR

a. Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya. *Stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat memengaruhi maupun dipengaruhi seperti pemerintah, *competitor*, masyarakat sekitar, lingkungan, lembaga diluar perusahaan, pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas, dan lain sebagainya (Suyono, 2010: 58).

b. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Menurut O'Donovan (2002) dalam Suyono (2010) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk mempertahankan *going concern*.

Corporate Governance

a. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006).

b. Komite Audit

Dalam pedoman GCG Indonesia (KNKG, 2006) dijelaskan bahwa, komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

c. Kepemilikan Institusional

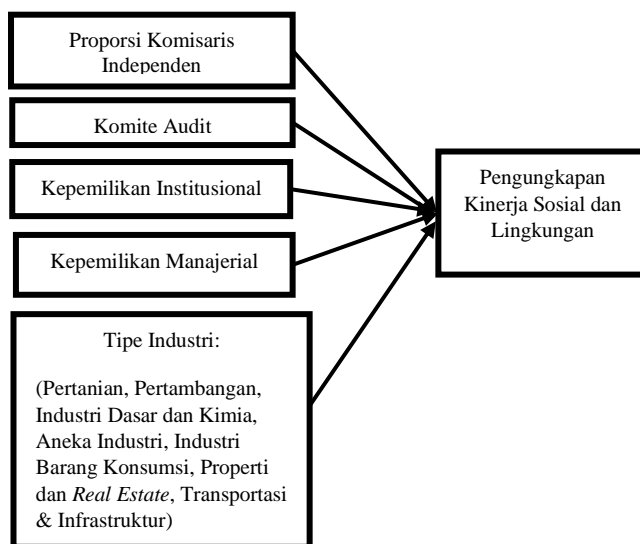
Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham-saham yang dimiliki oleh pihak-pihak berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, dan institusi lainnya.

d. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustiarini, 2008). Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan.

Tipe Industri

Tipe industri adalah jenis entitas bisnis yang dikelompokkan berdasarkan sektor usaha yang dijalankannya. Tipe industri dikelompokkan menjadi 7 sektor industri yaitu sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar dan Kimia, Aneka Industri, Industri Barang Konsumsi, Properti dan Real Estate, dan Transportasi dan Infrastruktur.



Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian Santioso dan Chandra (2012) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Badjuri (2011) menunjukkan dewan komisaris independen terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian Nainggolan (2015) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Selanjutnya Claudya (2015) menunjukkan komisaris independen memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan pada proksi indeks *disclosure*. Adanya Dewan Komisaris Independen diharapkan dapat memberikan kontrol dan *monitoring* bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial. Semakin besar persentase Komisaris Independen, maka akan meningkatkan aktivitas pengawasan terhadap kualitas pengungkapan dan mengurangi usaha menutupi informasi perusahaan (Prasojo, 2011). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₁: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan.

Penelitian Hani (2012) menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Suryono dan Prastiwi (2011) menyatakan bahwa

keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Sejalan dengan penelitian Handjani, dkk (2009) menunjukkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap CSR. Berdasarkan keputusan Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal (4 kali per tahun) rapat dewan komisaris yang ditetapkan anggaran dasar perusahaan. Semakin sering mengadakan rapat, maka koordinasi komite audit akan semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk pengungkapan CSR. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat peneliti adalah sebagai berikut:

H₂: Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan.

Dalam penelitian Susanti dan Riharjo (2013) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Saraswati dan Yudhistira (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Novita dan Djakman, 2008 dalam Nurkhin, 2009). Sebagai contoh kontrol yang dapat diberikan adalah memberikan arahan dan masukan kepada manajemen ketika manajemen tidak melakukan aktivitas positif seperti pengungkapan CSR untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat peneliti adalah sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosmasita (2007) menunjukkan kepemilikan manajerial secara positif berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Rawi dan Muchlish (2010) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap CSR. Saraswati dan Yudhistira (2015) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Ross, et al., 2002 dalam Tamba, 2013). Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Tamba, 2011). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat peneliti adalah sebagai berikut:

H₄: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suropto (2000) menggunakan variabel industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan bank dan non bank, hasilnya tidak signifikan. Subiyantoro dalam Rahayu (2006) menggunakan variabel industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan manufaktur dan non manufaktur, tetapi hasilnya tidak signifikan. Dalam penelitian Rahayu (2006) memasukkan variabel industri yang dikelompokkan ke dalam perusahaan jasa dan non jasa (riil), hasilnya tidak signifikan. Sedangkan dalam penelitian Sembiring (2005), Zulfi (2014), Widyasari dan Rahman (2008), dan Anggraini (2006) yang menggunakan variabel tipe industri yang dikelompokkan dalam *high profile* dan *low profile* menunjukkan variabel tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan yang memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat akan mengungkapkan lebih banyak informasi sosial. Apabila dikaitkan dengan teori legitimasi, hal ini dilakukan perusahaan untuk melegitimasi kegiatan operasinya dan menurunkan

tekanan dari para aktivis sosial dan lingkungan (Sari, 2012). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat peneliti adalah sebagai berikut:

H₅: Tipe Industri berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional (*correlational study*) karena peneliti ingin mencari atau menguji hubungan antara variabel penting yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang didokumentasikan dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Adapun sumber data adalah dari www.idx.co.id. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan dan meringkas data-data yang terkait dengan penelitian. Selain itu, juga melakukan studi pustaka dengan menelaah dari riset-riset terdahulu dan literatur-literatur terkait. Populasi yang terkait dengan penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar (*listed*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dipilih dalam penentuan sampel adalah:

1. Sampel yang dipilih adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014, sehingga perusahaan yang *delisting* dari BEI tidak dimasukkan sebagai sampel.
2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dan mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) lengkap termasuk catatan atas laporan keuangan periode 2012-2014 di situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
3. Memiliki data lengkap terkait dengan variabel yang akan diteliti.

Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat atau variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Pengungkapan CSR diukur dengan proksi CSRDI (*corporate social responsibility disclosure index*) berdasarkan indikator GRI (*global reporting initiatives*) versi 3 yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari *website* www.globalreporting.org. Pengukuran CSRDI menggunakan *content analysis*, setiap item yang diungkapkan akan diberi nilai 1, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. CSRDI diperoleh melalui rumus:

$$CSRDI_j = \frac{\sum x_{ij}}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan:

CSRDI_j: *Corporate Social Responsibility* Indeks Perusahaan.

n_j: Jumlah kriteria pengungkapan CSR untuk perusahaan j, n_j ≤ 79

X_{ij}: 1 = Jika kriteria diungkapkan; 0 = Jika kriteria tidak diungkapkan

Variabel bebas atau independen

Proporsi Komisaris Independen

Proporsi komisaris independen diukur dengan menghitung prosentase komisaris independen terhadap seluruh anggota dewan komisaris perusahaan.

$$PKI = \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan}}$$

Komite Audit

Komite audit itu dibentuk oleh Dewan Komisaris di perusahaan dan akan bertanggungjawab secara langsung kepada Dewan Komisaris itu sendiri. Komite audit diukur dengan melihat jumlah pertemuan atau rapat anggota komite audit yang dimiliki perusahaan per tahun.

Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan institusional dapat diukur sesuai dengan presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi, yang dirumuskan:

$$KI = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham oleh pihak institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Manajerial

Struktur kepemilikan manajerial dapat diukur sesuai persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun periode pengamatan, dapat dirumuskan:

$$KM = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajerial}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Tipe Industri

Diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu nilai 1 untuk sektor yang akan diuji dan 0 untuk sektor lain yang tidak diuji.

Analisis Statistik Deskriptif

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2007). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak menggunakan analisis statistik non-parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Jika hasil penelitian menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) = 10 berarti ada multikolinearitas, sebaliknya jika nilai VIF < 10 berarti tidak ada multikolinearitas. Uji autokorelasi merupakan pengujian dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya maupun nilai periode sesudahnya. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (Suliyanto, 2011). Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2007).

Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menggambarkan hubungan beberapa variabel, sehingga suatu variabel dapat diprediksikan dari variabel yang lain. Bentuk persamaan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 D_1 + \beta_6 D_2 + \beta_7 D_3 + \beta_8 D_4 + \beta_9 D_5 + \beta_{10} D_6 + \beta_{11} D_7 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan

α = Konstanta

β_{1-11} = Koefisien Regresi

X_1 = Proporsi Komisaris Independen

X_2 = Jumlah anggota komite audit

X_3 = Persentase Kepemilikan Institusional

X_4 = Persentase Kepemilikan Manajerial

D_{1-7} = Variabel Dummy Tipe Industri: 1) Pertanian, 2) Pertambangan, 3) Industri Dasar dan Kimia, 4) Aneka Industri, 5) Industri Barang Konsumsi, 6) Properti dan *Real Estate*, 7) Transportasi & Infrastruktur.

Uji Ketepatan Model

Untuk melakukan uji ketepatan model (*goodness of fit*) digunakan uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan tipe industri terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Persamaan F-Test dapat dirumuskan sebagai berikut (Suliyanto, 2011):

$$F = \frac{R^2 - k - 1}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

Keterangan:

F : nilai F hitung

R^2 : koefisien determinasi

n : banyaknya sampel

k : banyaknya variabel bebas

Uji Parsial (Uji t)

Uji hipotesis (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan tipe industri terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan secara terpisah. Karena dalam hipotesis variabel proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sudah ditentukan arah pengaruh terhadap variabel dependen, maka digunakan uji t satu arah (*one tailed*). Sedangkan dalam hipotesis variabel tipe industri belum ditentukan arah pengaruh terhadap variabel dependen, maka digunakan uji t dua arah (*two tailed*). Untuk mencari besarnya t hitung digunakan rumus sebagai berikut (Suliyanto, 2011).

$$T - \text{test} = \frac{\beta_i}{s\beta_i}$$

Keterangan:

β_i : koefisien regresi

$s\beta_i$: standar error atas koefisien regresi variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar (*listed*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 kecuali sektor keuangan dan perdagangan, jasa dan investasi. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 279 perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2014. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sebanyak 66 perusahaan tidak mengungkapkan laporan tahunan secara lengkap dan berturut-turut termasuk catatan atas laporan keuangan selama periode 2012-2014. Serta 169 perusahaan tidak memiliki data lengkap terkait variabel yang diteliti. Berdasarkan metode yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh 44 perusahaan yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan sehingga dapat dijadikan sampel selama 3 tahun penelitian yaitu tahun 2012-2014. Total data yang digunakan untuk penelitian sebanyak 132 data analisis. Daftar nama perusahaan yang menjadi sampel dicantumkan dalam lampiran 1.

Hasil Analisis Data

Berdasarkan pada hasil statistik deskriptif dalam lampiran 2, dapat diketahui bahwa pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan mempunyai nilai rata-rata 0,3522 atau 35,22%. Nilai minimum adalah 0,0886 atau 8,86% yang diperoleh oleh PT Lippo Karawaci Tbk, dengan tahun perusahaan 2014 dan nilai maksimum 0,69620 atau 69,62% yang diperoleh oleh PT Telkom Indonesia Tbk (Persero), dengan tahun perusahaan 2012. Rata-rata variabel pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan sebesar 35,22%, dan standar deviasi sebesar 0,1126826. Hal ini menandakan bahwa pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan tahunan

dapat dikatakan masih cukup rendah, sebab masih kurang dari 50% dari total 79 item yang harus diungkapkan oleh perusahaan yaitu dilihat dari rata-rata pengungkapan kinerja sosial yang dilakukan perusahaan yang dilakukan perusahaan sebesar 35,22%.

Proporsi komisaris independen memiliki nilai minimum 0,25 atau 25% yang dimiliki oleh PT Eterindo Wahanatama Tbk pada tahun perusahaan 2012, 2013, dan 2014. Dan nilai maksimum 0,80 atau 80% yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Nilai rata-rata proporsi komisaris independen adalah 39,75% dan standar deviasi 10,26.

Variabel komite audit memiliki nilai rata-rata 10,348485 kali rapat per tahun dengan nilai standar deviasi 11,2988447. Nilai minimum variabel komite audit adalah 0 kali rapat atau tidak diungkapkan yang dimiliki oleh PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2012, 2013, PT Provident Agro Tbk tahun 2012, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tahun 2013, 2014, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2013, 2014, PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2013 dan PT Ciputra Development Tbk tahun 2013. Sedangkan nilai maksimum variabel komite audit adalah 72 kali rapat yang dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada tahun 2013.

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata 0,310659 dengan standar deviasi 0,3454436. Nilai minimum variabel kepemilikan institusional adalah 0 persen atau tidak diungkapkan yang dimiliki oleh PT Astra Agro Lestari Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Provident Agro Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Salim Ivomas Pratama Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Indo Tambangraya Megah Tbk tahun 2012, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Holcim Indonesia Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Astra Otoparts Tbk tahun 2012, PT Goodyear Indonesia Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Lippo Karawaci Tbk tahun 2012, 2013, dan PT Mitrahahtera Segara Sejati Tbk tahun 2012, 2013. Sedangkan nilai maksimum adalah 0,9568 atau 95,68% yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk tahun 2012.

Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum 0 persen atau tidak diungkapkan dalam laporan tahunan yang dimiliki oleh PT Astra Agro Lestari Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Provident Agro Tbk tahun 2012, PT Sampoerna Agro Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Salim Ivomas Pratama Tbk tahun 2012, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Bumi Resources Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Vale Indonesia Tbk tahun 2013, 2014, PT Asahimas Flat Glass Tbk tahun 2012, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Holcim Indonesia Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Goodyear Indonesia Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2013, 2014, PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2014, PT Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2012, PT Bakrieland Development Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT Lippo Karawaci Tbk tahun 2012, 2013, PT PP (Persero) Tbk tahun 2012, 2013, 2014, PT XI Axiata Tbk tahun 2012, 2013, PT Mitrahahtera Segara Sejati Tbk tahun 2014. Sedangkan nilai maksimum adalah 0,70 atau 70% yang dimiliki oleh PT Sat Nusapersada Tbk tahun 2012, 2013, dan 2014. Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai rata-rata 0,042170 atau 4,22% kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial dengan standar deviasi 0,1449216.

Variabel tipe industri dalam penelitian ini dibagi menjadi 7 sektor industri yaitu: pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, properti dan *real estate* dan transportasi dan infrastruktur. Tipe industri diukur dengan menggunakan variabel dummy dengan cara memberi kode 0 atau 1 (Ghozali, 2013). Variabel tipe industri memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1, dengan nilai rata-rata 13%.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berdasarkan analisis data pada lampiran 2, menunjukkan hasil uji normalitas dengan uji statistik non-parametrik menggunakan *one-sample Kolmogorov-Smirnov test*. Besar nilai *Kolmogorov-Smirnov*,

yaitu 0,612 dengan signifikansi 0,849. Signifikansi 0,849 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa data berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Proporsi Komisaris Independen	0,821	1,218
Komite Audit	0,598	1,672
Kepemilikan Institusional	0,623	1,606
Kepemilikan Manajerial	0,816	1,225
Pertambangan	0,477	2,096
Industri Dasar dan Kimia	0,530	1,887
Aneka Industri	0,475	2,105
Industri Barang Konsumsi	0,561	1,782
Properti dan Real Estate	0,448	2,232
Transportasi dan Infrastruktur	0,438	2,284

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF tiap variabel independen yang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan VIF ≤ 10 . Sehingga, dapat diartikan bahwa antar variabel independen tidak terdapat saling pengaruh atau korelasi.

c. Uji Autokorelasi

Berdasarkan lampiran 2 nilai Durbin Watson sebesar 1,443. Jika dibandingkan dengan nilai tabel, menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, jumlah sampel (n) 132, dan variabel independen sebanyak (k) 10, maka diperoleh nilai $dU = 1,874$ dan $dL = 1,484$. Nilai Durbin Watson diketahui lebih kecil dari dL , yaitu $1,443 < 1,484$. Berdasarkan daftar pengambilan keputusan nilai uji Durbin-Watson hasil ini menunjukkan bahwa regresi ada autokorelasi positif.

Dalam menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 tetap penting dilakukan karena berbagai alasan. Meskipun ada sejumlah prosedur pengujian yang sudah dikembangkan oleh Hong dan Kao (2004) dan Inoue dan Solon (2006) yang menyatakan pengujian untuk korelasi serial belum menjadi praktek standar dalam penelitian yang menggunakan data panel. Inoue dan Solon (2006) menyatakan bahwa telah ada pengujian yang sederhana akhir-akhir ini seperti tes portmanteau. Meskipun tes portmanteau memang ada untuk data panel, seperti yang diusulkan oleh Hong dan Kao (2004) dan Inoue dan Solon (2006), belum ada tes untuk korelasi serial dalam data panel. Sehingga, pengujian autokorelasi untuk data yang tidak bersifat time series yaitu *cross section* atau panel akan sia-sia atau tidaklah berarti.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Sig.
---------------------	------

Proporsi Komisaris Independen	0,086
Komite Audit	0,657
Kepemilikan Institusional	0,662
Kepemilikan Manajerial	0,117
Pertambangan	0,965
Industri Dasar dan Kimia	0,884
Aneka Industri	0,746
Industri Barang Konsumsi	0,038
Properti dan Real Estate	0,544
Transportasi dan Infrastruktur	0,292

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Hal tersebut mengartikan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi baik dan layak digunakan.

Uji Ketepatan Model (*Goodness of fit*)

Berdasarkan lampiran 2, menunjukkan besarnya nilai $F_{hitung} = 3,764$ dan $F_{tabel} = 1,96$ dengan $df = (9)$ dan $\alpha = (0,05)$, maka $F_{hitung} 3,764 > F_{tabel} 1,96$. Dengan demikian, model regresi dinyatakan fit.

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi

Berdasarkan lampiran 2, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *adjusted R*² sebesar 0,174 atau 17,4%. Nilai *R*² yang $< 0,5$ menunjukkan bahwa variabel independen tidak memberikan informasi atau menjelaskan secara menyeluruh mengenai variabel dependen. Artinya, 17,4% variabel pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan dapat dijelaskan oleh variabel proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan tipe industri, sedangkan sisanya 82,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 3. Ringkasan Hasil t_{hitung}

Variabel Independen	Nilai t_{hitung}	Sig
Proporsi Komisaris Independen	2,882	0,005
Komite Audit	2,547	0,012
Kepemilikan Institusional	2,135	0,035
Kepemilikan Manajerial	0,463	0,644
Pertanian	5,524	0,000
Pertambangan	-1,703	0,091

Industri Dasar dan Kimia	-1,014	0,312
Aneka Industri	-2,125	0,036
Industri Barang Konsumsi	-3,274	0,001
Properti dan Real Estate	-3,979	0,000
Transportasi dan Infrastruktur	-2,009	0,047

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan hasil uji t dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa variabel proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan sebab nilai signifikansi $\leq 0,05$. Sedangkan variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu 0,644, sehingga variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel tipe industri sektor pertanian, sektor industri barang konsumsi, dan properti dan *real estate* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan, sebab nilai signifikansi $\leq 0,025$. Sedangkan, tipe industri sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan transportasi dan infrastruktur mempunyai nilai signifikansi $> 0,025$, yaitu sebesar (0,091), (0,312), (0,036), (0,047) sehingga variabel tipe industri sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri dan sektor transportasi dan infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan.

Pembahasan

Variabel proporsi komisaris independen memiliki nilai $t_{hitung} = 2,882$ dan nilai signifikansi = 0,005. Nilai signifikansi $\leq 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,882 > 1,6575$). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Dengan demikian hipotesis yang pertama dalam penelitian yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan dapat diterima. Hasil menunjukkan bahwa komisaris independen yang dimiliki perusahaan dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Nurkhin (2009) menyatakan keberadaan komisaris independen dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen dalam kegiatan operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan aktivitas pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Keberadaan Dewan Komisaris Independen yang bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi sehingga akan memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan CSR dalam rangka memastikan keselarasan antara keputusan dan tindakan perusahaan dengan nilai-nilai sosial dan legitimasi perusahaan (Ratnasari, 2011). Dengan kewenangannya dewan komisaris independen akan memberikan tekanan kepada manajemen untuk melaksanakan aktivitas pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan dengan baik.

Hasil analisis pada variabel komite audit menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,012 kurang dari $\alpha = 0,05$ dan t_{hitung} memiliki tanda positif. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan

bahwa variabel komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan diterima. Suryono dan Prastiwi (2011) menyatakan bahwa semakin berkualitas komite audit, maka mereka akan semakin dapat memahami makna strategis dari pengungkapan informasi dan apa yang dibutuhkan *stakeholder* secara luas. Oleh karena itu, melalui jumlah pertemuan, komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan CSR sebagai media komunikasi perusahaan dengan *stakeholder* dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan GCG. Tingkat frekuensi rapat terbukti dapat menjamin bahwa pelaksanaan monitoring terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan akan berjalan dengan efektif. Sehingga peluang manajemen untuk melakukan kecurangan dengan menyembunyikan informasi tidak dapat dilakukan. Alasan yang mendukung yaitu bahwa tingkat jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dapat menjamin bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan akan berjalan secara efektif (Djuitaningsih dan Marsyah, 2012). Dengan demikian, peluang manajemen untuk melakukan kecurangan dengan menyembunyikan informasi dapat diminimalisasi dan pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan menjadi semakin transparan.

Hasil analisis pada variabel kepemilikan institusional menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki signifikansi 0,035 kurang dari $\alpha = 0,05$ dan t_{hitung} memiliki tanda positif. Sehingga hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan diterima. Pemegang saham institusional biasanya berbentuk entitas seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan institusi lain. Investor institusional umumnya merupakan pemegang saham yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Menurut Mursalin (2007) dalam Saraswati dan Yudhistira (2015), kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengurangi masalah keagenan dengan meningkatkan proses monitoring. Pemegang saham institusional juga memiliki *opportunity*, *resources*, dan *expertise* untuk menganalisis kinerja dan tindakan manajemen. Investor institusional sebagai pemilik sangat berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham oleh pihak institusi maka akan semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan (Tamba, 2011).

Hasil analisis variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai signifikansi 0,644 lebih dari $\alpha = 0,05$. Sehingga, hasil uji t menunjukkan variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan ditolak. Hasil penelitian variabel kepemilikan manajerial tidak sejalan dengan prediksi yang mengungkapkan adanya hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Dapat dibuktikan kepemilikan manajerial pada perusahaan di Indonesia cenderung masih sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat dari statistik deskriptifnya yaitu rata-rata kepemilikan manajemen hanya sebesar 0,042170. Adanya kepemilikan manajerial yang relatif kecil menyebabkan manajer belum dapat memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Rendahnya saham yang dimiliki oleh manajemen mengakibatkan pihak manajemen belum merasa ikut memiliki perusahaan karena tidak semua keuntungan dapat dinikmati oleh manajemen yang menyebabkan pihak manajemen termotivasi untuk memaksimalkan utilitasnya sehingga merugikan pemegang saham. Hasil penelitian ini mengartikan bahwa kepemilikan saham oleh manajerial tidak mempengaruhi aktivitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Hal ini disebabkan manajer lebih fokus terhadap laporan keuangan perusahaan dalam membangun *image* perusahaan. Menurut Adhipradana dan Daljono (2014), manajer mungkin beranggapan bahwa laporan keuangan akan lebih banyak diperhatikan oleh para *stakeholder* dari pada *sustainability report*. Kecenderungan manajer untuk lebih fokus pada laporan keuangan menyebabkan variabel kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan.

Untuk variabel *dummy* tipe industri, menunjukkan bahwa pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan pada sektor pertanian (*exclude group*) mempunyai nilai rata-rata 0.267 atau 26,7%. Hasil analisis menunjukkan tipe industri sektor pertanian terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan memiliki nilai signifikansi = 0,000 lebih dari $\alpha = 0,025$. Sehingga, sektor pertanian berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Dengan demikian, hipotesis kelima (a) dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian mengartikan bahwa variabel tipe industri pada sektor pertanian berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Sektor pertanian termasuk dalam perusahaan-perusahaan *high-profile*. Perusahaan yang aktivitas ekonominya mengolah lingkungan (*high*), lebih cenderung mengungkapkan informasi tentang pengaruh aktivitasnya terhadap lingkungan dari pada industri lainnya.

Variabel *dummy* tipe industri, menunjukkan bahwa pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan sektor pertambangan 6,4 % lebih rendah dari pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan sektor pertanian. Hasil pada tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi 0,091 lebih dari $\alpha = 0,025$. Sehingga, hasil uji t menunjukkan sektor pertambangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Dengan demikian, hipotesis kelima (b) ditolak. Sektor pertambangan termasuk dalam perusahaan-perusahaan *high-profile*. Hasil penelitian mengartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang *high-profile* (visibilitas konsumen tinggi, risiko politis tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi) tidak cenderung melakukan pengungkapan aktivitas atau tanggung jawab sosial perusahaan lebih tinggi atau banyak dibandingkan perusahaan-perusahaan yang *low-profile*. Dengan adanya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74, perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri *high-profile* khususnya yang bergerak di bidang ekstraktif lebih banyak disorot dan diawasi oleh *stakeholder*-nya khususnya pemerintah. Adanya peraturan tersebut ternyata tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini mengartikan bahwa perusahaan di sektor pertambangan tidak cenderung melakukan pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan lebih banyak dari pada sektor lainnya. Hal ini dibuktikan pada perusahaan PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2014 hanya mengungkapkan 38 item dari 79 item yang seharusnya diungkapkan. Dengan demikian, perusahaan pada sektor pertambangan walaupun kaitannya sangat erat dengan lingkungan belum tentu memiliki kesadaran untuk mengungkapkan informasi lebih banyak terkait dengan pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan.

Variabel *dummy* tipe industri menunjukkan bahwa sektor industri dasar dan kimia 3,4 % lebih rendah dari pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan sektor pertanian. Hasil pada tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi 0,312 lebih dari $\alpha = 0,025$. Sehingga, hasil uji t menunjukkan sektor industri dasar dan kimia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Dengan demikian, hipotesis kelima (c) ditolak. Hasil penelitian mengartikan bahwa variabel tipe industri sektor industri dasar dan kimia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Ketidakkonsistenan ini terjadi dimungkinkan karena kondisi ekonomi global yang tidak stabil, sehingga berdampak pada seluruh tipe industri dalam hal pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial (Ismiurniati, 2010). Menurut Freedman dan Jaggi (1988) dalam Sari (2012) perusahaan dengan kategori *low-profile* dengan kondisi ekonomi lemah akan lebih mengungkapkan tanggung jawab sosial dari pada perusahaan *high-profile*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan ingin investor mengetahui bahwa kondisi ekonomi perusahaan yang tidak terlalu baik disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab sosial.

Variabel *dummy* tipe industri, menunjukkan bahwa pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan sektor industri barang konsumsi 11,4% lebih rendah dari pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan sektor pertanian. Hasil pada tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,025$. Sehingga, hasil uji t menunjukkan sektor aneka industri berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Dengan demikian, hipotesis kelima (e) diterima. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diartikan bahwa tipe industri sektor industri barang konsumsi berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Jones (1995) dalam Rahajeng (2010) menjelaskan bahwa industri yang berorientasi pada barang konsumsi akan lebih sensitif terhadap masalah keamanan produk dan lingkungan sekitar, dan hal ini dapat secara langsung berpengaruh

terhadap persepsi konsumen dan keputusan pembelian. Dikaitkan dengan teori legitimasi, hal ini dilakukan perusahaan untuk melegitimasi kegiatan operasinya dan menurunkan tekanan dari para aktivis sosial dan lingkungan. Perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (*low*) juga bisa memberikan perhatian dan kontribusi yang lebih dan dapat memberikan pengungkapan yang luas sama halnya dengan perusahaan yang aktivitas ekonominya mengolah lingkungan (*high*). Dengan demikian, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan lebih baik untuk semua jenis industri.

Variabel dummy tipe industri, menunjukkan bahwa pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan sektor properti dan *real estate* 13,7% lebih rendah dari pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan sektor pertanian. Hasil pada tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,025$. Sehingga, hasil uji t menunjukkan sektor properti dan *real estate* berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Dengan demikian, hipotesis kelima (f) diterima. Berdasarkan hasil penelitian dapat diartikan variabel tipe industri sektor properti dan *real estate* berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Perusahaan yang berorientasi pelanggan (*low*) dapat diharapkan untuk menunjukkan perhatian yang lebih besar dengan mengungkapkan CSR kepada masyarakat, untuk meningkatkan *image* perusahaan dan pengaruh pada penjualan. Diantaranya perusahaan bangunan, perbankan, *supplier* peralatan medis, properti, produk tekstil, dan rumah tangga. Menurut Freedman dan Jaggi (1988) dalam Sari (2012), perusahaan kategori *low-profile* dengan kondisi ekonomi yang lemah akan lebih mengungkapkan tanggung jawab sosial daripada perusahaan *high-profile*. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan ingin investor mengetahui bahwa kondisi ekonomi perusahaan yang tidak terlalu baik disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Dengan mengeluarkan biaya untuk tanggung jawab sosial perusahaan, diharapkan akan memberikan dampak positif untuk kondisi ekonomi perusahaan di masa mendatang.

Variabel dummy tipe industri, menunjukkan bahwa pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan sektor transportasi dan infrastruktur 8,5% lebih rendah dari pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan sektor pertanian. Hasil pada tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi 0,047 lebih dari $\alpha = 0,025$. Sehingga, hasil uji t menunjukkan sektor properti dan *real estate* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Dengan demikian, hipotesis kelima (g) ditolak. Berdasarkan hasil penelitian dapat diartikan variabel tipe industri sektor transportasi dan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Sektor transportasi termasuk dalam *high-profile*. Bagi perusahaan kategori *high-profile*, perusahaan (manajemen) merasa tidak perlu melaporkan hal-hal yang dianggap mengganggu informasi tentang kondisi ekonomi yang sudah baik seperti pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan (Sari, 2012).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

1. Variabel proporsi komisaris independen terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan.
2. Variabel komite audit terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan.
3. Variabel kepemilikan institusional terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan.
4. Variabel kepemilikan manajerial terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan.
5. Variabel tipe industri yang terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan adalah sektor pertanian, sektor industri barang konsumsi dan properti dan *real estate*. Sedangkan, sektor pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri dan transportasi dan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan.

B. Implikasi

1. Investor dapat mempertimbangkan keputusan untuk berinvestasi berdasarkan persentase jumlah komisaris independen yang dimiliki perusahaan.

2. Investor dapat mempertimbangkan keputusan untuk berinvestasi berdasarkan banyaknya jumlah rapat komite audit yang dilakukan suatu perusahaan.
3. Pemegang saham institusional dapat memberikan arahan dan masukan kepada manajemen ketika manajemen tidak melakukan aktifitas positif seperti pengungkapan CSR untuk mendapatkan legitimasi masyarakat. Implikasinya bagi perusahaan untuk meningkatkan kemampuan jangka panjang pemegang saham institusional dapat memberikan tekanan kepada pihak manajemen untuk senantiasa melakukan investasi melalui kegiatan CSR-nya.
4. Kepemilikan manajerial pada perusahaan di Indonesia cenderung masih sangat rendah. Adanya kepemilikan manajerial yang relatif kecil menyebabkan manajer belum dapat memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan. Dengan demikian, implikasinya bagi perusahaan hendaknya meningkatkan kepemilikan saham oleh pihak manajemen sehingga pihak manajemen termotivasi untuk memaksimalkan kewenangannya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik serta tindakan pengungkapan CSR.
5. Bagi perusahaan hendaknya meningkatkan aktivitas pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan untuk setiap sektor industri baik yang memiliki dampak secara langsung maupun yang tidak langsung terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnantara, Komang. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Dan Corporate Social Responsibility Pada Nilai Perusahaan. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 18, No. 2.
- Badjuri, Achmad. 2011. Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme Coorporate Governance, Pengungkapan Coorporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Manufaktur dan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol.3, No.1
- Claudya, Ditta. 2015. *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan CSR*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro. (Tidak dipublikasikan).
- Djuitaningsih, Tita dan Wahdatul A Marsyah. 2012. Pengaruh Manajemen Laba Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *Media Riset Akuntansi*. Vol. 2. No. 2
- Das, Dixon, Michael. 2015. Corporate Social Responsibility Reporting: A Longitudinal Study of Listed Banking Companies in Bangladesh. *World Review of Business Research*. Vol. 5. No. 1. Pp. 130 – 154.
- Ghozali dan Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Ghozali, Imam. 2009. *SPSS. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Hani, Ummu. 2012. Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Indeks* Periode 2009-2011. Sripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (Tidak dipublikasikan).
- Handjani, Lilik, Sutrisno dan Grahita Chandrarin. 2009. The Effect of Earnings Management and Corporate Governance Mechanism to Corporate Social Responsibility Disclosure: Study at Public Companies In Indonesia Stock Exchange. *Simposium Nasional Akuntansi 12*. Palembang.
- Hong, Yongmiao dan Chihwa Kao. 2004. Wavelet Based Testing For Serial Correlation Of Unknown Form In Panel Models. *Econometrica*. Vol. 72. No. 5.
- Inoue, Atsushi dan Gary Solon. 2006. A Portmanteau Test For Serially Correlated Errors In Fixed Effects Models. *Econometric Theory*. Vol. 22, 835-851.
- Janra. 2015. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan*. Artikel Universitas Negeri Padang.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Di Indonesia*. Jakarta.

-
- Kusuma, Dian, Amries Rusli Tanjung, Edfan Darlis. 2014. Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Dalam Sustainability Report. *Jom Fekom*. Vol. 1 No.2
- Murwaningsari, ETTY. 2009. Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 11, No.1: 30-41.
- Nurkhin, Ahmad. 2010. Corporate Governance Dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 2, No. 1, 46-55.
- Permata Sari. 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Proporsi Dewan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Saham Asing Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. Artikel Universitas Negeri Padang.
- Prasojo, Bagus Prio. 2011. *Pengaruh Corporate Governance terhadap tingkat pelaporan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro. (Tidak dipublikasikan).
- Rahajeng, Rami Galuh. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang. (Tidak dipublikasikan).
- Rahayu, W. 2006. Pengaruh Faktor Keuangan dan Non-Keuangan Terhadap Voluntary Disclosure Index Dalam Laporan Keuangan Perusahaan Publik. Skripsi S-1. Universitas Gajah Mada (Tidak dipublikasikan).
- Rahman, dan Widayarsi. 2008. The Analysis Of Company Characteristic Influence Toward Csr Disclosure: Empirical Evidence Of Manufacturing Companies Listed In JSX. *JAAI*. Vol 12 No.1. 25-35.
- Ratnasari, Yunita. 2011. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Dalam Sustainability Report*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Rawi Dan Muchlish. 2010. Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusi, Leverage Dan Corporate Social Responsibility. *Symposium Nasional Akuntansi 13*. Purwokerto.
- Rosmasita. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta. *Symposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Rustiarini. 2010. Pengaruh Corporate Governance Pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan. *Symposium Nasional Akuntansi XII*. Purwokerto.
- Said, Roshima., Yuserrie Hj Zainuddin., Dan Hasnah Haron. 2009. The Relationship between Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Characteristics In Malaysian Public Listed Companies. *Social Responsibility Journal*. Vol. 5, No. 2, Hal. 212-226.
- Santioso, Linda dan Chandra. 2012. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Umur Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*. Vol. 14, No.1
- Sari, Rizkia. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Nominal*. Vol 1. No 1.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta. *Symposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Suripto, B. 2000. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Desember, pp. 31-34. STIE YKPN.

-
- Suryono, Hari dan Prastiwi. 2011. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Banda Aceh.
- Susanti, Susi dan Ikhsan Budi Riharjo. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Cosmetics And Household. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Volume 1 Nomor 1.
- Swardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Suyono, Eko. 2010. *Corporate Spcial Responsibility Di Indonesia antara Harapan dan Realitas*. Bandung: UNPAD PRESS.
- Tamba, Erida Gabriella Handayani. 2011. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro. (Tidak dipublikasikan).
- Terzaghi, Muhammad. 2012. Pengaruh Earning Management Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntanso (Jenius)*. Vol.2 No.1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Utama, Sidharta. 2007. *Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia*. <http://www.Ui.Edu>. Diakses 5 Oktober 2015.
- Waryanto. 2010. *Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. (Tidak dipublikasikan).
- Yudhistira dan Sarawati. 2015. Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial Dan Kepemilikan Saham Institusional Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. <http://Jimfeb.Ub.Ac.Id>. Diakses 20 September 2015.
- Zulfi. 2014. *Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Pada Perusahaan Go Public Di Indonesia*. Artikel Universitas Negeri Padang.